

# SKRIPSI

## **PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**OLEH**

**UCHA SEFTILARANI. G**

**NPM : 135310880**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**


Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : UCHA SEFTILARANI G.  
NPM : 135310880  
FAKULTAS : EKONOMI  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)  
JUDUL : PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)

DISETUJUI

PEMBIMBING I


  
Dr. Kasman Arifin, SE. MM, Ak

PEMBIMBING II

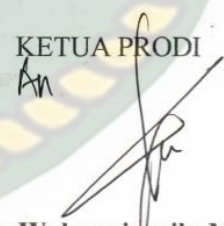
  
Siska, SE. M.Si. Ak. CA

MENGETAHUI

DEKAN

  
Drs. H. Abrar, M.Si. Ak. CA

KETUA PRODI

  
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si. Ak. CA

**PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKANBARU)**

**A B S T R A K**

Oleh

**UCHA SEFTILARANI. G**

**NPM : 135310880**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap *good governance* (studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuesioner yang disebarakan kepada responden dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan di 20 dinas di Kota Pekanbaru. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data dan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dijumpai dalam penelitian dilapangan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan diambil kesimpulan dan diberikan saran. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Hasil dari uji t, variabel implementasi standar akuntansi pemerintah diperoleh sebesar -0.934 dengan tingkat signifikan p-value 0.356 ( $p > 0.05$ ) yang artinya lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *good government governance* pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru. Hasil dari uji t, variabel sistem pengendalian intern diperoleh sebesar 5.049 dengan tingkat signifikan p-value 0.000 ( $p < 0.05$ ) yang artinya lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *good government governance* pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru. Hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa  $R^2$  pada penelitian ini adalah sebesar 0.385 (38.5%). Dengan demikian variabel implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variabel *good government governance* pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru adalah sebesar 38.5% dan 61.5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Kata Kunci : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance**

**THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD  
IMPLEMENTATION AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS  
ON GOOD GOVERNANCE  
(STUDY ON REGIONAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONS  
PEKANBARU CITY)**

**A B S T R A K**

*By*

**UCHA SEFTILARANI. G.**

**NPM: 135310880**

*The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of government accounting standards and internal control systems on good governance (a study on the Regional Organization of Pekanbaru City).*

*Data collection techniques used in this study is to use a questionnaire method distributed to respondents in the study. The population in this study were employees in 20 offices in Pekanbaru City. The number of samples used in this study were 60 people. Data analysis method used is descriptive method that is analyzing data by collecting data and to explain the situations and conditions found in the field research then compared with various theories and conclusions are drawn and given advice. Data analysis in this study was carried out using SPSS computer program assistance.*

*Based on the results of the study note the results of the t test, the variable implementation of government accounting standards obtained by -0.934 with a significant level of p-value 0.356 ( $p > 0.05$ ), which means greater than the value of  $\alpha$ . So it can be concluded that the variable implementation of government accounting standards does not have a significant effect on the variables of good government governance in the Regional Organizations in Pekanbaru. The results of the t test, internal control system variables obtained by 5049 with a significant level of p-value 0.000 ( $p < 0.05$ ), which means less than  $\alpha$ . So it can be concluded that the internal control system variable has a significant influence on the variable of good government governance in the Regional Organizations in Pekanbaru. The results of the calculation of the regression analysis note that  $R^2$  in this study was 0.385 (38.5%). Thus the variable implementation of government accounting standards and internal control systems can explain the variable of good government governance in Regional Organizations in Pekanbaru is 38.5% and 61.5% explained by other variables outside the model.*

**Keywords : Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control Systems Against Good Governance**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance (studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari penulisan skripsi ini, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian,

pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua ku, Ayahnda Rasidin Gultom (Alm) dan Ibunda Nuraini, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
3. Bapak Drs. Abrar, MSi, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si. Ak. CA, Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIR
5. Bapak Kasman Arifin, SE., MM., Ak, selaku dosen pembimbing I yang tak pernah lelah meberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai.
6. Ibu Siska. SE., M.Si., Ak. CA, selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus.

8. Pimpinan beserta staff pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang digunakan dalam penelitian ini, yang telah bersedia memberi kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Adek-adekku Sarah Amalia Gultom, Annisa Chyntia Rani dan Salwa Salsabila yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2013 di Fakultas Ekonomi UIR dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan support selama ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2019

Penulis

**Ucha Seftilarani. G**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>17</b>
A. Telaah Pustaka.....	17
1. <i>Government Governance</i> .....	16
2. Standar Akuntansi Pemerintah .....	19
3. Sistem Pengendalian Internal .....	27
4. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap <i>Good             Governmet Governance</i> .....	30
5. Penelitian Terdahulu.....	33
6. Model Penelitian.....	34
B. Hipotesis Penelitian.....	35



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
	A. Jenis Penelitian.....	36
	B. Operasional Variabel.....	36
	C. Populasi dan Sampel .....	37
	D. Jenis dan Sumber Data .....	39
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
	F. Uji Kualitas Data .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>47</b>
	A. Gambaran Umum Dinas-Dinas Kota Pekanbaru.....	47
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
	A. Deskripsi Responden.....	70
	B. Uji Kualitas Data .....	72
	C. Uji Asumsi Klasik .....	74
	D. Analisis Data .....	77
	E. Pengujian Hipotesis .....	79
	F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
	A. Kesimpulan .....	89
	B. Saran.....	90

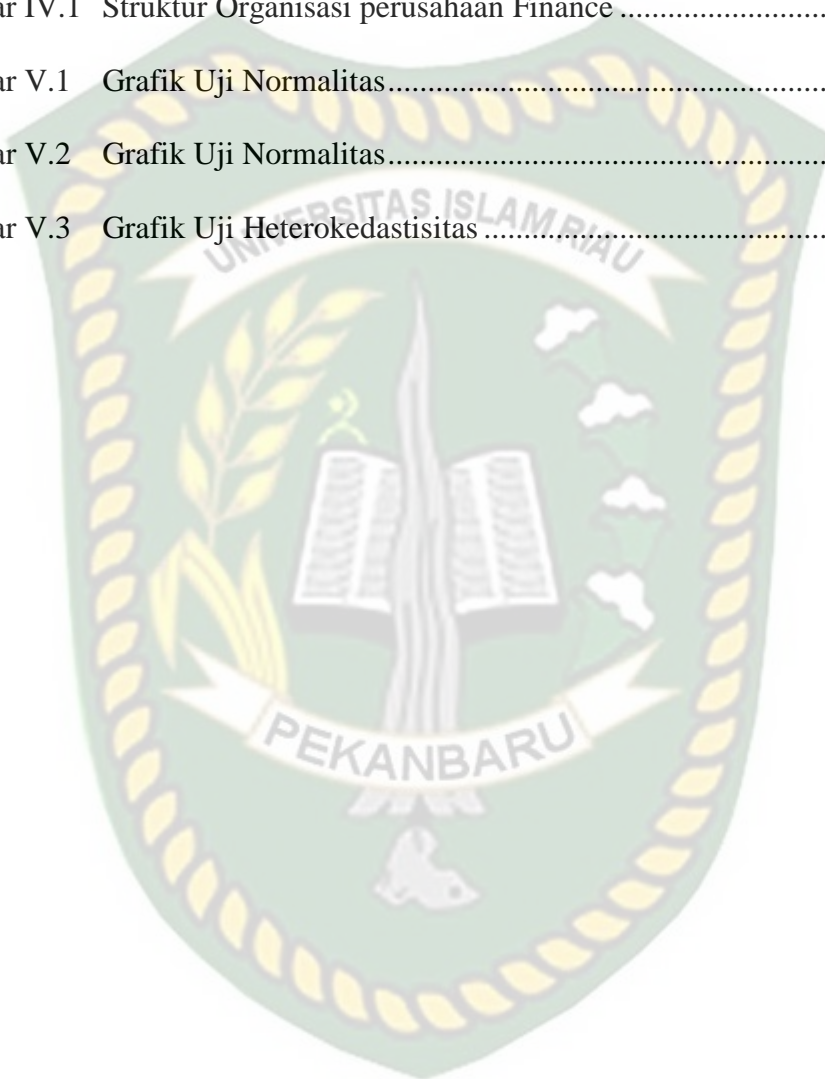
**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1	Daftar Nama Perusahaan Finance Di Pekanbaru.....	52
Tabel V.1.	Jumlah responden dan tingkat pengembalian.....	68
Tabel V.2.	Karakteristik Responden pada Perusahaan Finance di Kota Pekanbaru .....	69
Tabel.V.3.	<i>Descriptive Statistics</i> .....	70
Tabel.V.4.	Hasil Uji <i>Validitas</i> Data.....	72
Tabel V.5	Hasil Uji <i>Reliabilitas</i> Data.....	73
Tabel V.6	Hasil Uji Multikolinearitas .....	75
Tabel V.7	Hasil Analisis Regresi Berganda .....	76
Tabel V.8	Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	80
Tabel V.9	Hasil Koefisien Determinasi.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Model Penelitian.....	42
Gambar IV.1	Struktur Organisasi perusahaan Finance .....	61
Gambar V.1	Grafik Uji Normalitas.....	74
Gambar V.2	Grafik Uji Normalitas.....	74
Gambar V.3	Grafik Uji Heterokedastisitas .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita cita bangsa dan Negara. Dalam hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Secara sederhana *governance* dapat diartikan sebagai proses dari pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Konsep *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti *corporate governance*, dan *local governance*. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab secara efisien dan efektif dengan menjafa kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain. Secara teoritis *Good Government Governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan serta pertanggung jawaban kepada masyarakat (Kaloh, 2010:172).

Istilah pemerintah (*government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi pemerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintah. Sedangkan tata pemerintahan (*governance*) lebih menggambarkan

pada pola hubungan yang sebaiknya antar elemen yang ada, yaitu pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan social dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintah. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proposional antara empat kelembagaan. Dengan demikian cakupan tata pemerintah (*governance*) lebih luas dibandingkan dengan pemerintah (*government*), karena unsure yang terlibat dalam tata pemerintah mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk didalamnya ada unsur pemerintah (*government*).

Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah mengalami perubahan pada sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berorientasi sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri dilakukan setelah dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Dan diperbarui oleh UU No. 12 Tahun 2008, lahirlah *local government* (pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya).

Dalam perkembangan sektor publik dewasa ini, yang dapat diamati adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara. Praktek akuntabilitas publik di

Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan keuangan negara, sedangkan dalam kenyataannya keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin mengetahui lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan memenuhi prinsip *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Akbar, 2013).

Salah satu tuntutan masyarakat untuk meningkatkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagaimana peranan pengawasan internal pada setiap organisasi perangkat daerah. Masyarakat bertanya kinerja pengawasan tersebut sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat lamban kinerja beberapa organisasi perangkat daerah dalam menangani beberapa persoalan yang terjadi, salah satunya mengenai kebakaran lahan dan hutan. Guna mewujudkan *good government governance* pada pemerintah diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada pengawasan internal disetiap instansi pemerintah (organisasi perangkat daerah).

Menurut Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009, *Good Government Governance* adalah konsep pengelolaan pemerintah yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proposional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapapun yang berperan dan peran apapun yang

dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi perilaku yang berkarakteristik tertentu sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Mardiasmo (2004 : 25) mengemukakan bahwa, penyelenggaraan suatu negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipatif, aturan hukum, transparansi, daya tanggap atau responsivitas, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

*Good governance* dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan stakeholders baik bidang sosial, ekonomi maupun politik serta pendayasaan sumber daya yang ada, manusia ataupun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Salam, 2004 : 19).

Agar tuntutan dari masyarakat dapat terwujud, maka perlu adanya audit pada organisasi sektor publik, dimana audit pada organisasi sektor publik ini tidak

hanya sebatas audit atas laoran keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, nmaun juga implementasi standar akuntansi pemerintah yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) yaitu pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atau pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas (Suratmi, Ni Made, Nyoman Trisna Herawati dan Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014).

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, dan berbagai kritikan lainnya. Adanya kritikan-kritikan tersebut menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen dalam lingkungan sektor publik. Salah satu elemen penting dalam perubahan manajemen sektor publik yang saat ini menjadi topik utama di lingkungan sektor publik adalah perubahan praktik akuntansi. Perubahan praktik akuntansi yang dimaksud adalah penerapan basis akuntansi yang pada awalnya menggunakan basis kas (*cash basis*) menjadi basis akrual (*accrual basis*). Perubahan basis akuntansi tersebut merupakan salah satu bentuk dari reformasi akuntansi sektor publik yang dilakukan, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan dan menyediakan informasi sekaligus laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas dibanding basis kas.

Setelah jangka waktu pengadopsian kas menuju akrual telah habis, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Peraturan



tersebut, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh selambat-lambatnya 4 tahun setelah peraturan tersebut di terbitkan, yaitu pada tahun 2015. Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu keharusan karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, bukan berarti penerapan basis akrual dapat dengan mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya hambatan. Sehingga perlu dilakukan persiapan mengenai kondisi-kondisi yang dapat mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan basis akuntansi akrual dipercaya sebagai suatu teknologi informasi yang superior untuk menciptakan transparansi yang lebih besar atas aktivitas sektor publik. Penerapan basis akuntansi akrual bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam lingkungan pemerintahan (Ichsan, 2014).

Perlu adanya perubahan yang mendasar untuk secara bertahap menggantikan akuntansi yang berbasis kas dengan akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat diukur biaya pelayanan jasa pemerintahan, efisiensi dan kinerja Pemerintah. Selain itu, dapat diketahui kewajiban kontijensi pemerintah karena dicatat komitmen atau hak maupun kewajiban kontijensi negara terutama untuk penerimaan maupun pengeluaran yang masa anggarannya melampaui satu tahun (Nasution, 2008).

Pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing, salah satu alasan mengapa BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) antara lain karena belum memadainya SPIP serta belum adanya SPIP yang melembaga (Isye,2012).

Terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk penerapan akan SAP yang berlaku. Penerapan terhadap SAP sangat diperlukan agar hasil dari laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Keberhasilan penerapan *Good Government Governance* juga tidak terlepas dari peran pengendalian internal yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan stakeholders serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Internal Kontrol dalam sebuah organisasi. Menurut Coso Report (2008) pengendalian internal adalah mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitasnya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan.

Struktur pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan penegndalian dapat dipenuhi. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah daerah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah (Zalni, 2013).

Selain itu, pengendalian intern dalam pelaksanaanya juga harus diuji ke efektifitasnya. Penentuan apakah pengendalian telah di implementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta apakah pelaksanaan sudah memiliki

kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif serta tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern. Menurut Arens (2008:370) jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan pada lingkungan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Unsur dari sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk mencapai tujuan dari pengendalian intern, jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan dengan baik (PP No. 60/2008)

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi implementasi standar akuntansi pemerintah atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi standar akuntansi pemerintah/operasional masih harus ditingkatkan hamper di semua organisasi perangkat daerah di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas

publik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Febrianto Wahyu Nugroho (2005 : 86) menyatakan bahwa BPKP melaksanakan Implementasi standar akuntansi pemerintah secara independen untuk menilai keberhasilan atas kinerja BUMN/BUMD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga dapat membantu manajemen auditan dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Ristanti (2014) tentang pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance*. Hasilnya membuktikan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Sedangkan penelitian dari Ruspina (2013) Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan *good governance*. Dimana semakin baik kinerja pemerintah daerah dan penegelolaan keuangan daerah, maka penerapan *good governance* pun akan semakin baik. Sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh dengan penerapan *good government governance*.

Banyaknya temuan BPK menandakan bahwa lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan. Untuk Kota Pekanbaru dengan 14 temuan, atas dasar temuan BPK terhadap pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota se-Riau. Pada tahun 2017, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu (1) Masih terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau; (2) Proses penganggaran Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja (ASB); dan (3) Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. ([Http://Pekanbaru.bpk.go.id](http://Pekanbaru.bpk.go.id))

Beberapa persoalan menjadi temuan BPK seperti: kegiatan pemerintah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan/fiktif, kelebihan bayar pada setiap kegiatan, kekurangan volume atas pengerjaan fisik, sisa kegiatan terlambat disetorkan, kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan, potensi penerimaan yang tidak dibuat payung hukum dan administrasi perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga yang tidak jelas, oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru harus memperkuat pengendalian internal dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dan diharapkan kedepannya opini BPK terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru bisa mendapatkan penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adanya permasalahan dalam kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru menjadi persoalan yang perlu dicermati dalam penerapan tata kelola pemerintah yang baik. Terutama yang menjadi sorotan masyarakat tentang persoalan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkait kasus korupsi pengadaan lampu penerang jalan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 yang merugikan negara sekitar 1,3 Miliar. Persoalan ini menggambarkan masih lemahnya beberapa OPD ([riau.go.id](http://riau.go.id)).

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel dependen penilaian sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya *good governance*. Penilaian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2014) tentang “Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kab. Luwu (studi kasus kantor inspektorat Kab. Luwu)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* dilingkup inspektorat sehingga nanti secara garis besar akan mendorong tata keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Yusniayar, Darwanis, Syukriy Abdullah (2015) “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan dampaknya pada Kualitas

Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Aceh)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern berpengaruh terhadap *Good Governance* dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian dari Ruspina (2013) “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance* (studi empiris pada pemerintahan kota padang)”. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh dengan penerapan *Good Governance*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Government Governance* (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan berikut:

1. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru?



3. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaru implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap *Good Government Governance*. Serta pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *Good Government Governance*.
2. Bagi Pihak Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah Pekanbaru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

memberikan masukan kepada pihak instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama dari proposal ini menguraikan secara singkat tentang isi proposal yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian dan hipotesis

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang pemilihan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, selanjutnya defenisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data statistic deskriptif, analisi regresi logistik dan pengujian hipotesis.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

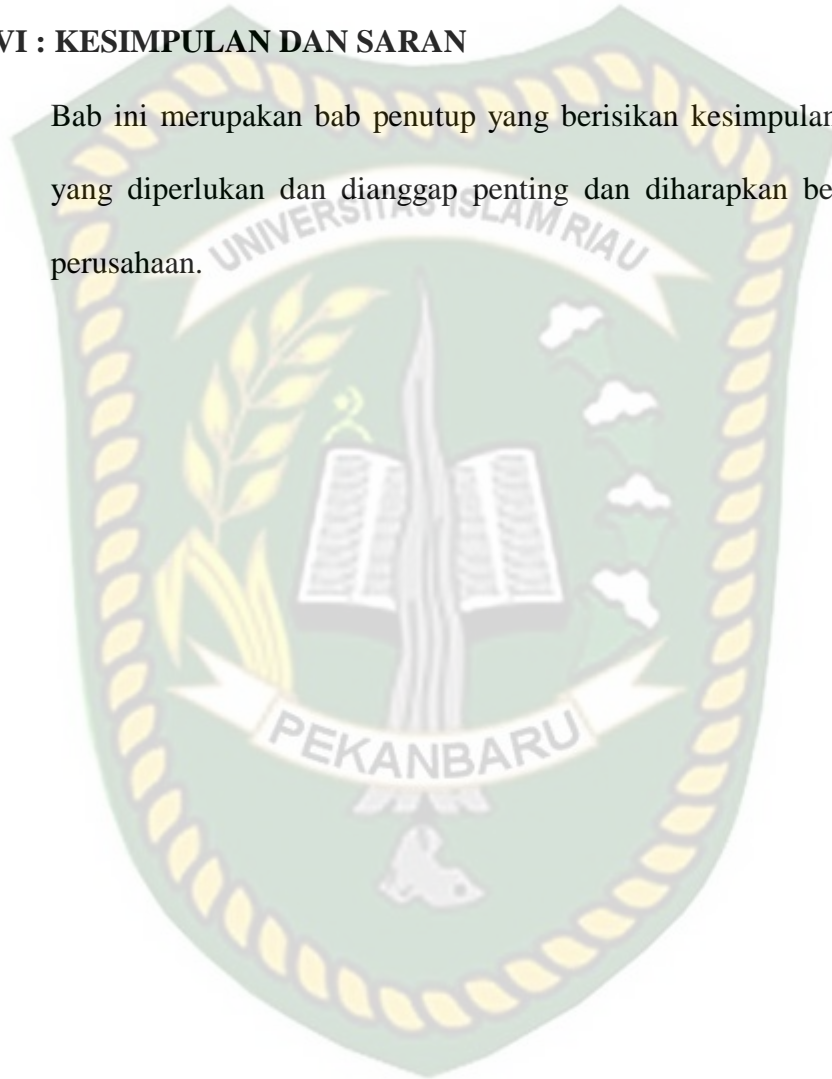
Bab Ini menuliskan gambaran umum perusahaan tentang sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dianggap penting dan diharapkan berguna bagi perusahaan.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. *Government Governance*

Menurut Mardiasmo (2007:17), *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. United National Development Program (UNDP) memberikan pengertian *Good Governance* sebagai berikut :

*“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage nation’s affair at all levels. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”.*

Merujuk pada konsep tersebut, *Good Governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama dari *Good Governance* adalah bagaimana pengguna kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan politik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (check and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari

perilaku dan budaya kerjanya menurut Indriansyah (Wardani;2010), UNDP memberikan karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)  
Setiap orang atau setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif
2. Aturan Hukum  
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang *fair* dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas.
3. Transparansi  
Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)  
Setiap melaksanakan pemerintahan semua instansi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholdersnya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)  
Dalam hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik.
6. Berkeadilan  
Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi  
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas  
Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)

kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*syakeholders*). Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi tersebut bersifat internal atau eksternal.

9. Bervisi strategi

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* yaitu

(Tajuddin, 2010:29) :

1) Faktor manusia pelaksana (*man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan Good Governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local govt*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Disamping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu pegawai daerah itu sendiri.

2) Faktor partisipasi masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan Good Governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat . masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah.

3) Faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *Good Governance*.

## 2. Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (2010:1) adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit (Sinaga ; 2010).

“SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.” (Wijaya;2008; 313)

Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu konsep dan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari beberapa

pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahannya. Yang mana pada SAP Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan kementerian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas



pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan (Fakhrurazi ; 2010).

Beberapa tantangan dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya adalah (Bastian; 2012; 7):

a. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan Negara serta Undang-Undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan Negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen atau Lembaga di pemerintah pusat dan Dinas/Unit untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu ke pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah disusun dengan mengacu kepada Standar

Akuntansi Pemerintah. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

- b. Tersedianya SDM yang kompeten  
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Walikota/Bupati kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa. Akibat tidak sejalannya dunia pendidikan dan dunia praktis pemerintahan, pemborosan terjadi melalui *training* dan *workshop*. Apabila hal ini sejalan, maka hampir satu triliun rupiah akan bisa dihemat.
- c. Resistensi terhadap perubahan  
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.
- d. Lingkungan/masyarakat  
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pangalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. "Sumber daya manusia, kedudukan, fasilitas dan infrastruktur, peraturan dan intensitas pelatihan administrasi dan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah".

Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam rangka memenuhi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam

penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih lanjut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

SAP di Indonesia diatur pertama sekali melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual, selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Terdapat 2 (dua) lampiran dalam PP No. 17 Tahun 2010, yaitu lampiran I menggunakan basis akrual dan lampiran II menggunakan basis kas menuju akrual dengan mengakomodir kembali PP No. 24 Tahun 2005 yang diperuntukan bagi entitas yang belum mampu menggunakan basis akrual.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas menuju akrual ini melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima ke Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara). Dan pada akhir periode diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari, serta mencatat hak ataupun kewajiban Negara).

Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan

jurnal kolorari) akan diperoleh Neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus / defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas / kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71tahun2010).

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang - undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Indra Bastian (2010:140) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

1. Basis akrual
2. Komponen laporan keuangan
3. Periode pelaporan

### **3. Sistem Pengendalian Internal**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal adalah :

Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberi keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah :

Proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Cose Report (2008) pengendalian internal adalah :

Mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitasnya, mengecek kecermatan dan keandalan dari tata akuntasinya, memajukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diciptakan pimpinan. Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya kecurangan dan penggelapan.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dan dibangun SPIP. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang efektif dan efisien  
Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Laporan keuangan yang dapat di andalkan  
Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
- 3) Pengamanan asset Negara  
Asset Negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara. Pengamanan asset Negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan asset akan berakibat pada mudahnya pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan  
Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakn, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut PP No. 60 Tahun2008 pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait, yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian  
Lingkungan pengendalian akan berpengaruh terhadap orang-orang dalam perusahaan dan menjadi landasan bagi internal kontrol. Lingkungan pengendalian mencerminkan seluruh sikap, kesadaran dan tindakan dari pimpinan, dewan komisaris, manajemen, pemilik atau pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanan pada suatu organisasi atau entitas (Kresiadanti, 2013:5).  
Menurut PP No. 60 Tahun 2008 pasal 4 menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam linhkungan kerjanya, melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia, perwujudan peran aparat

pengawasan internal pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Menurut Arens (2008) penaksiran risiko dimaksudkan sebagai sistem pengendalian intern merupakan usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Kresiadanti, 2013).

Penilaian risiko dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan (Saptapradita, 2015). Menurut PP No. 60 Tahun 2008 pasal 41 sistem pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

3) Kegiatan pengendalian

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 18 menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun yang termasuk dalam kegiatan pengendalian yaitu review atas kinerja instansi, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi dan otorisasi, pencatatan yang akurat, pembatasan akses atas sumberdaya, dokumentasi atas sistem pengendalian.

4) Informasi dan komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yakni meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, meringkas dan melaporkan transaksi entitas yang berhubungan. Sistem yang efektif harus memenuhi tujuan dari internal kontrol yang eksistensi, kelengkapan akurasi, klasifikasi, tepat waktu dan pengikhtisiran. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

Sehingga dalam PP No. 60 Tahun 2008 pasal 41 dan 42 pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah adalah (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, (b) mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

5) Pemantauan

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu atau melakukan penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut PP



No. 60 Tahun 2008 pasal 43 pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan dalam proses pengendalian intrn pemerintah yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan riview lainnya.

#### **4. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Governmet Governance***

##### **a. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah Terhadap *Good Governmet Governance***

*Good governance* merupakan peran pemerintah yang baik dalam mengelola keuangan daerah. Pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun LKPD sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan baik sarana maupun prasarana pengelolaan keuangan daerah selain dari bentuk yang dituangkan SAP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada seluruh penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah.

LKPD disusun sesuai dengan SAP (UU No. 1/2004), yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah daerah, agar terciptanya prinsip-prinsip *good governance* pada esensinya merupakan pemerintah yang efektif dan modern, demokratis dan keterbukan terhadap masyarakat. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap *good governance* pada pemerintah daerah (Njeru 2000).

Implementasi standar akuntansi pemerintah dapat membantu dalam mengawasi dan meninjau jalannya pemerintah sektor publik untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas atau program pemerintah secara bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Menurut Mahmudu (2007:192) implementasi standar

akuntansi pemerintah mencakup tentang audit ekonomi dan efisiensi serta audit program. Dengan adanya implementasi standar akuntansi pemerintah maka setiap entitas pemerintah akan bekerja secara optimal dan meningkatkan kinerjanya, sehingga akan meningkatkan efektifitas *Good Government Governance*. Jadi seharusnya tinggi implementasi standar akuntansi pemerintah, maka akan semakin tinggi pula penerapan *Good Government Governance*.

Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *Good Governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi implementasi standar akuntansi pemerintah atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kineja/operasional masih harus di tingkatkan hamper di semua organisasi perangkat daerah di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksana implementasi standar akuntansi pemerintah/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam kerangka mewujudkan *Good Governance*.

#### **b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Government Governance***

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk member keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern berguna untuk terciptanya

pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas informasi keuangan. Efektifitas rancangan sistem pengendalian akuntansi tergantung konteks penggunaannya pada masing-masing organisasi itu sendiri. Penciptaan *good governance* dapat digunakan sistem pengendalian intern yang akan menunjukkan seberapa besar kualitas informasi keuangan, operasional dan manajerial pada suatu organisasi (Dharma, 2004).

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik atau lebih baik yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Harus diakui bahwa saat ini *Good Governance* masih belum terlaksana oleh bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *Good Governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Hal itu dialami oleh hampir seluruh pemerintah di Indonesia. Jika sistem penegndalian internal pemerintah tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Jadi bisa dikatakan jika sistem pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan baik akan memberikan efisien dan efektif dalam operasi, pelaporan keuangan yang dihasilkan handal, asset milik negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan terciptalah tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Sukmaningrum (2012) mengemukakan bahwa, sistem penegndalian intern meliputi sebagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Dengan demikian, penegndalian intern merupakan pondasi *good governance*

dan garis pertama dalam melawan ketidak absahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Sehingga pengendalian intern pemerintah berhubung dengan *Good Governance*. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila sistem pengendalian intern diimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik Negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menunjang teori diatas digunakanlah penelitian tentang pengaruh pengendalian intern terhadap *Good Government Governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ristanti (2014) dan Habibie (2013), menemukan hasil penelitiannya bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.

### **5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sanagat penting diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan acuan bagi penulis.

Yusniar (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governancedan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern terhadap *good governanceserta* dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial

berpengaruh terhadap *good governance*. sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan *good*

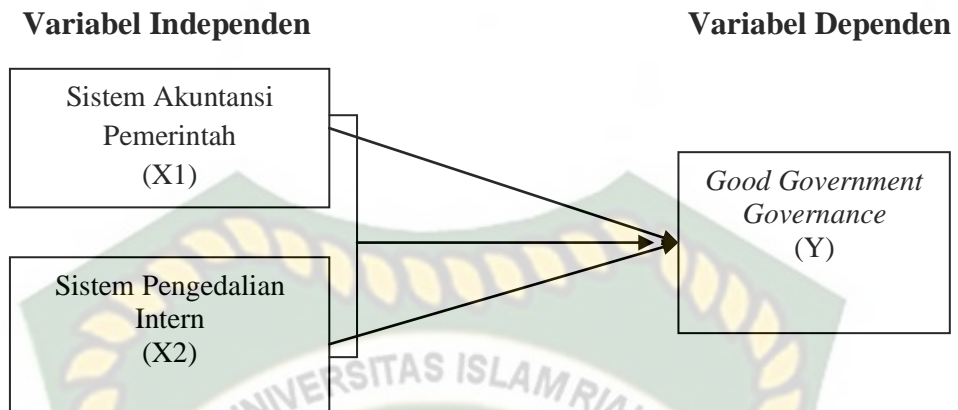
Ruspina (2013), meneliti pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelola keuangan daerah dan pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *good governance*. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kinerja aparatur pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap *good governance*.

Ristanti, Sinarwati dan Sujana (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap *good governance* (studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

## **6. Model Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, telaah pustaka dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan maka sebagai dasar merumuskan hipotesis, disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian. Model penelitian Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Government Governance.

**Gambar 2**  
**Model Penelitian**



### B. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan berdasarkan dasar teoritis dalam penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub> : Terdapat Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah Terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
- H<sub>2</sub> : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
- H<sub>3</sub> : Terdapat Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama Terhadap *Good Government Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Pendekatan ini diklasifikasikan dengan bentuk berupa respon yang diberikan yaitu secara tertulis atau dalam bentuk kuisisioner. Kuisisioner penelitian ini disebar kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di tiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru. Untuk kuisisioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan kepada penulis dalam waktu yang telah disepakati.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di kota Pekanbaru. Untuk sampelnya menggunakan teknik pengambilan sampel total sampling dimana seluruh Organisasi Perangkat Daerah yaitu dinas-dinas yang terdapat di Kota Pekanbaru dijadikan penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Kepala Subbagian Keuangan
3. Staf Subbagian Keuangan pada Dinas/kantor/Badan di Kota Pekanbaru.

Berikut dapat dilihat masing-masing OPD yang memiliki wakil 3 orang untuk dijadikan sampel pada table berikut :

**Tabel 3.1**  
**Daftar Sampel dan Responden Penelitian**

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Responden
1.	Dinas Pendidikan	3
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	3
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
4.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
7.	Dinas Ketahanan Pangan	3
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
10.	Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian	3
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3
12.	Dinas Koperasi dan UKM	3
13.	Dinas Kesehatan	3
14.	Dinas Perhubungan	3
15.	Dinas Pertanian dan Perikanan	3
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3
17.	Dinas Pertahanan	3
18.	Dinas Tenaga Kerja	3
19.	Dinas Sosial	3
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
	Jumlah	60

Sumber : [www.go.riau.com](http://www.go.riau.com)

### C. Definisi Operasional Variabel

Berikut dapat dilihat definisi operasional variable pada penelitian ini :

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala	Kuisi on er
<i>Good Government Governance</i> (Y)	<i>Governance</i> dapat diartikan sebagai proses dari sustu pengambilan keputusan dan	1. Transparansi 2. Partisipasi 3. Akuntabilitas 4. Supermasi Hukum (Sari, 2013, Bappenas,	Likert	12



	proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan (Sari,2013)	2008 dalam susitaningsih, 2010:7)		
Implementasi standar akuntansi pemerintah (X <sub>1</sub> )	Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (Kepmendagri No. 29/2002).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi</li> <li>2. Pengklasifikasian</li> <li>3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reabilitas</li> <li>4. Menghitung masing-masing pengaruh operasi (Kepmendagri No. 29/2002)</li> </ol>	Likert	8
Sistem Pengendalian Intern (X <sub>2</sub> )	Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberi keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian</li> <li>2. Penilaian Resiko</li> <li>3. Prosedur Pengendalian</li> <li>4. Pemantauan</li> <li>5. Informasi dan Komunikasi (PP No. 60 Tahun 2008)</li> </ol>	Likert	9

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternative jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu:

SS= Sangat Setuju

S= Setuju

RR= Ragu-Ragu

TS= Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Menurut Sugiyono (2008) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel, kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data yang diperlukan tentang pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap *good government governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Jenis data yang diperoleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara melalui angket atau kuisisioner penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk memperoleh keterangan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta keterangan mengenai data tentang pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap *good government governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Angket

Angket, berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada organisasi perangkat organisasi di Kota Pekanbaru yang menjadi sampel dari penelitian untuk memperoleh, memperjelas dan menguatkan data mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap *good government governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

#### **F. Uji Kualitas Data**

Sebelum pengujian dilakukan terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji kualitas data. Uji kualitas data perlu dilakukan karena ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat bergantung dari kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Artinya suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliabel dan kurang valid. Sedangkan

kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data (Indriantoro dan Supomo, 2009 : 180).

### **1. Uji Validitas (Ketepatan)**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrument dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan perkataan lain instrument tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini menguji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis metode *pearson correlation*. Jika korelasi antar masing-masing indikator variabel terhadap konstruk variabel menunjukkan nilai positif dan hasil signifikan, maka dinyatakan valid. Dalam hal ini signifikansi pada level 0,01 (2 – tailed). (Ghozali, 2011 : 135).

### **2. Uji Reliabilitas (Konsistensi)**

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:132). Pengujian konsisten internal penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Teknik *cronbach alpha* merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. Apabila koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 maka instrument tersebut reliable, sebaliknya jika

koefisien alpha instrument tersebut lebih rendah dari 0,60 maka instrument tersebut tidak reliable untuk digunakan dalam penelitian ini (Ghozali : 2011).

## **G. Asumsi Klasik**

### **1. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak terdapat dua cara yaitu dengan uji statistik.

#### **1. Uji statistik**

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2011):

- a) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka Hipotesis ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### **2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $Tolerance < 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui metode grafik dan uji statistik. Uji statistik dengan menggunakan uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (*absRes\_1*) sebagai variabel dependen dengan variabel independen tetap. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

#### H. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah metode statistik untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2011: 6). Analisis yang dilakukan adalah menguji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dan proses datanya menggunakan program komputer SPSS. Model tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e_i$$

Keterangan:

- Y = *good government governance*
- a = Konstanta
- X<sub>1</sub> = Implementasi standar akuntansi pemerintah
- X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Intern
- bl-2 = Koefisien regresi
- ei = Variabel pengganggu

### I. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan model regresi dan pengujian pengaruh parsial masing-masing variabel bebas. Pengujian model regresi dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara simultan seluruh variabel bebas. Pengujian model regresi dilakukan dengan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji t.

#### 1. Uji t (parsial)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS dengan membandingkan tingkat signifikasinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig  $\alpha = 0,05$ . Apabila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independent tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independent tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Jika dinyatakan secara statistik adalah sebagai berikut:

$$H_0 - b_i = 0 \quad H_a - b_i \neq 0$$

t hitung dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$t \text{ — hitung} = \frac{\text{Koefisien Regresi (bi)}}{\text{Standar Deviasi (bi)}}$$

Jika  $t\text{-hitung} >$  dari  $t\text{-tabel}$  (a. df) maka  $H_0$  ditolak, dan

Jika  $t\text{-hitung} <$  dari  $t\text{-tabel}$  (a. df) maka  $H_0$  diterima.

## 2. Uji F (simultan)

Kemudian pengujian signifikansi variabel secara simultan (uji F). Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas :

- Jika probabilitas ( $p\text{-val}$ )  $>$  0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat
- Jika probabilitas ( $p\text{-val}$ )  $<$  0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

## 3. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama variabel terikat atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat.

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel bebas



yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat dilihat dari koefisien korelasi parsial yang terbesar.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Dinas-Dinas Kota Pekanbaru

##### a. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pendidikan. Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, membawahi ;
  - 1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
  - 2. Seksi Sekolah Dasar;
  - 3. Seksi Prasaranan dan Sarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, membawahi :
  - 1. Seksi SMP;
  - 2. Seksi SMA / SMK;
  - 3. Seksi Prasaranan dan Sarana SMP / SMA / SMK.
- e. Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
  - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- f. Bidang Pengembangan Kesiswaan, membawahi :
  - 1. Seksi Kesenian;
  - 2. Seksi Penjaskes Sekolah;
  - 3. Seksi Kreatifitas Siswa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **b. Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kesehatan. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi ;
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Rumah Sakit dan Kesehatan Lain;
  3. Seksi Kefarmasian.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
  1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
  2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  3. Seksi Pengamatan Penyakit, Wabah dan Bencana.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana;
  2. Seksi Gizi;
  3. Seksi Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja
- f. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
2. Seksi Jaminan Kesehatan;
3. Seksi Peran Serta Masyarakat;

#### **c. Dinas Sosial dan Pemakaman**

Dinas Sosial dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Sosial dan Pemakaman. Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi ;
  1. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia;
  2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin;
  3. Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
  1. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Nafza dan Hukuman;
  2. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat;
  3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- e. Bidang Bantuan Sosial, membawahi :
  1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
  2. Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
  3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial.
- f. Bidang Pemakaman, membawahi :
  1. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **d. Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Tenaga Kerja. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi ;
  1. Seksi Syarat-syarat Kerja;
  2. Seksi Pengupahan dan Lembaga Ketenagakerjaan;
  3. Seksi Hubungan Industrial dan Sengketa Kerja.

- d. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
  - 1. Seksi Norma Kerja;
  - 2. Seksi Norma K3;
  - 3. Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak.
- e. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, membawahi :
  - 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
  - 2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja;
  - 3. Seksi Standarisasi, Kompetensi dan Kelembagaan Pelatihan.
- f. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
  - 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - 3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

**e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Angkutan, membawahi ;
  1. Seksi Angkutan Jalan;
  2. Seksi Angkutan Perairan dan Udara;
  3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, membawahi :
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
  2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara.
- e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :

1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan;
3. Seksi Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas Perairan dan Udara.

f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (ORSAT);
3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminisasi Informasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi ;
  1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
  2. Seksi Perkembangan dan Persebaran;
  3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Mutasi Penduduk;
  3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
  1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  3. Seksi Pencatatan Sipil Lainnya.
- f. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahi :
  1. Seksi Pendataan dan Pelaporan;

2. Seksi Jaringan Komunikasi;
  3. Seksi Informasi dan Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Susunan organisasi Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi ;
1. Seksi Kesenian;
  2. Seksi Nilai-Nilai Budaya;
  3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
1. Seksi Promosi;
  2. Seksi Bimbingan Masyarakat;
  3. Seksi Informasi dan Dokumentasi.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Jasa Pariwisata;
  2. Seksi Rekreasi dan Hiburan;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **h. Dinas Pekerjaan Umum**

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pekerjaan Umum. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi ;
  1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
  1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahi :
  1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
  2. Seksi Tata Bangunan;

3. Seksi Perumahan dan Pemukiman.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **i. Dinas Tata Ruang dan Bangunan**

Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tata Ruang dan Bangunan. Dinas Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Tata Ruang dan Bangunan. Susunan organisasi Dinas Penataan, Pengawasan Ruang dan Bangunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Penataan, Pengawasan Ruang dan Bangunan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Data dan Informasi, membawahi ;
  - 1. Seksi Survei dan Pemetaan;
  - 2. Seksi Penelitian Pengembangan Tata Ruang;
  - 3. Seksi Dokumentasi dan Penyebaran Informasi.
- d. Bidang Tata Ruang, membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- e. Bidang Bangunan, membawahi :
  - 1. Seksi Penelitian Administrasi;
  - 2. Seksi Penelitian Teknis;
  - 3. Seksi Penetapan Perizinan.
- f. Bidang Pengawasan Bangunan, membawahi :
  - 1. Seksi Pengawasan Operasional;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
  - 3. Seksi Pengaduan dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota



melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Koperasi, Usaha Makro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Susunan organisasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Koperasi, membawahi ;
  1. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
  2. Seksi Promosi Koperasi;
  3. Seksi Bina Usaha Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM;

2. Seksi Promosi dan Investasi UMKM;
  3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM.
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan, membawahi :
1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
  2. Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi UMKM;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP / USP Koperasi.
- f. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Pelatihan;
  2. Seksi Penyuluhan;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi ;
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
  2. Seksi Usaha Perindustrian;
  3. Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
  2. Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi;
  3. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
- e. Bidang Kerjasama, membawahi :
  1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi;
  2. Seksi Kerjasama Perindustrian;
  3. Seksi Kerjasama Perdagangan.
- f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, membawahi :

1. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan;
  2. Seksi Perlindungan Konsumen;
  3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **I. Dinas Pertanian**

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian. Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pertanian.

Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pertanian;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi ;
1. Seksi Hortikultura;
  2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  3. Seksi Tanaman Pangan.
- d. Bidang Peternakan, membawahi :
1. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
  2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
1. Seksi Bina Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;
  2. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
  3. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Bidang Perikanan, membawahi :
1. Seksi Produksi Perikanan;
  2. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Perikanan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**m. Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahi ;
  1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
  2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
  3. Seksi Penerangan Jalan.
- d. Bidang Kebersihan Kota, membawahi :
  1. Seksi Kebersihan Lingkungan;

2. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
  3. Seksi Penampungan Sampah.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. Seksi Pergudangan;
  2. Seksi Pemeliharaan;
- f. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan;
  2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**n. Dinas Pemuda dan Olah Raga**

Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemuda dan Olah raga. Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pemuda dan Olah Raga. Susunan organisasi

Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- b. Sekretaris, membawahi
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Bina Kepemudaan, membawahi ;
  1. Seksi Pembedayaan dan Pengembangan Kreatifitas;
  2. Seksi Kelembagaan.
- d. Bidang Bina Keolahragaan, membawahi :
  1. Seksi Keolahragaan;
  2. Seksi Peningkatan Prestasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum analisis data menggunakan regresi linier dilakukan, maka terlebih dahulu harus membahas analisa data secara deskriptif yang diperoleh penulis dari angket yang disebarakan kepada pegawai organisasi perangkat daerah di Pekanbaru sebanyak 60 orang.

#### A. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 60 eksemplar. Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner pada kantor organisasi perangkat daerah di Pekanbaru. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 1 Mei 2019 dan selesai pada tanggal 10 Mei 2019. Total kuesioner yang dibagikan adalah 60 kuesioner (100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.1**  
**Jumlah responden dan tingkat pengembalian**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang dikirim	60	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	13	22%
Total kuesioner yang kembali	47	78%
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Total kuesioner yang dapat dianalisis	47	78%

**Sumber:** Data Olahan, 2019

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan dan lama bekerja. Adapun karakteristik responden pada instansi/dinas di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel V.2**  
**Karakteristik Responden pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru**

No	Karakteristik	Jumlah	Presentase (%)
1	Jenis kelamin		
	1.Laki-Laki	12 orang	39%
	2.Perempuan	35 orang	61%
	Total	47 orang	100%
2	Latar Belakang Pendidikan		
	1. Ekonomi/Akuntansi	33 orang	55 %
	2. Lainnya	14 orang	45 %
	Total	47 orang	100%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	6 orang	19%
	2. D3	3 orang	10%
	3. S1	34 orang	58 %
	4. S2	4 orang	13 %
	Total	47 orang	100 %
5	LamaBekerja		
	1. 1-5 tahun	31 orang	48 %
	2. 6-10 tahun	12 orang	39 %
	3. >10 tahun	4 orang	13 %
	Total	47 orang	100 %

**Sumber: Hasil Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 47 responden jumlah responden laki-laki sebanyak 12 orang atau sekitar 39% sama dengan jumlah responden perempuan yang berjumlah 35 orang atau sekitar 61%.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan latar belakang pendidikan responden yaitu latar belakang pendidikan ekonomi sebanyak 33 responden atau sekitar 55%, untuk latar belakang pendidikan lainnya sebanyak 14 responden atau sekitar 45%.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden setiap instansi diketahui yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 6 responden atau sekitar 19%, untuk Diploma 3 (D3) persentase 10% dan dengan presentase terbanyak bergelar Strata 1 (S1) yaitu berjumlah 34 responden atau

58% dan persentase bergelar Pascasarjana (S2) yaitu hanya 4 responden atau hanya sekitar 13%.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 31 responden atau 48% telah bekerja selama 1-5 tahun, 12 responden atau 39% telah bekerja selama 6-10 tahun, dan untuk lama bekerja yang lebih dari 10 tahun memiliki jumlah responden terkecil yaitu sebanyak 4 responden atau 13%.

## **B. Uji Kualitas Data**

Pengujian kualitas data yaitu menguji validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Ghozali (2005) menyatakan bahwa kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat di evaluasi melalui uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sedangkan reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau tidak boleh acak.

### **1. Uji Validitas**

Validitas data dapat ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrument dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrument tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan/pernyataan pada kuesioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3**  
**Hasil Uji Validitas Data**

Variabel	<i>Pearson correlation</i>	Kesimpulan
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	0,601**-0,852**	Valid
Sistem Pengendalian Intern	0,632**-0,751**	Valid
<i>Good Government Governance</i>	0,596**-0,743**	Valid

**Sumber:** Data Olahan, 2019

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi signifikan pada level 0,01 sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *reliability analyze* dimana suatu instrument dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *cronbach* atau alpha sebesar <0,6 tidak reliabel; 0,6-0,7 *acceptable*, dan >0,8 sangat baik. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel V.4 dibawah ini:

**Tabel V.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Jlh Item	<i>Cronbach alpha</i>	Kesimpulan
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	4	0,724	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	5	0,812	Reliabel
<i>Good Government Governance</i>	4	0,863	Reliabel

**Sumber:** Data Olahan, 2019

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel V.4 menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach alpha* yang kurang dari 0,60, sehingga instrument tersebut reliabel untuk digunakan.

### C. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik. Beberapa uji asumsi klasik yaitu:

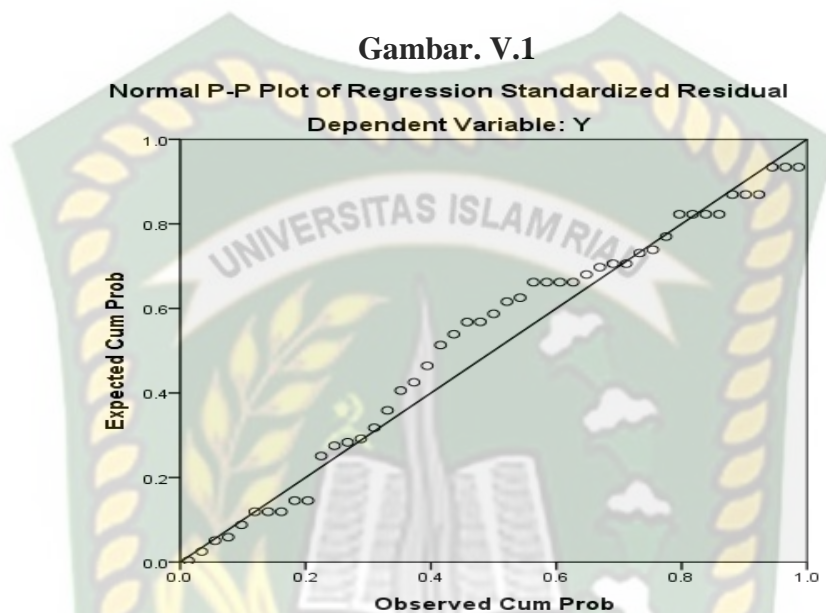
#### 1. Uji Normalitas

Sebelum analisis data menggunakan regresi linier dilakukan, maka terlebih dahulu harus memenuhi asumsi-asumsi penafsiran parametrik dan koefisien regresi agar tidak bias dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan pengujian terhadap analisa data dan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Asumsi analisis regresi yang akan diuji adalah uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari normal probability plot. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya jika data tersebar acak tidak berada disekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Pada penelitian ini, pengujian terhadap normalitas data berdasarkan data awal belum terpenuhi dimana pada grafik normal probability plot ditunjukkan

bahwa data yang menyebar tidak seluruhnya berada disekitar garis diagonal. Agar normalitas data terpenuhi maka peneliti melakukan transformasi data. Setelah transformasi data dilakukan maka normalitas model regresi penelitian ini terlihat grafik normal probability plot berikut ini:



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti pola distribusi normal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Sehingga uji statistik F dan uji statistik t dapat dilakukan untuk menguji hipotesis.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memiliki hubungan antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat adanya multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batasan nilai VIF untuk masing-masing nilai variabel adalah 5. Jika nilai VIF dari hasil penelitian lebih dari 5 maka variabel tersebut memiliki

pengaruh multikolinieritas. Sebaliknya jika VIF dibawah angka 5 maka dianggap bebas dari pengaruh multikolinieritas. Nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut:

**Tabel.V.5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

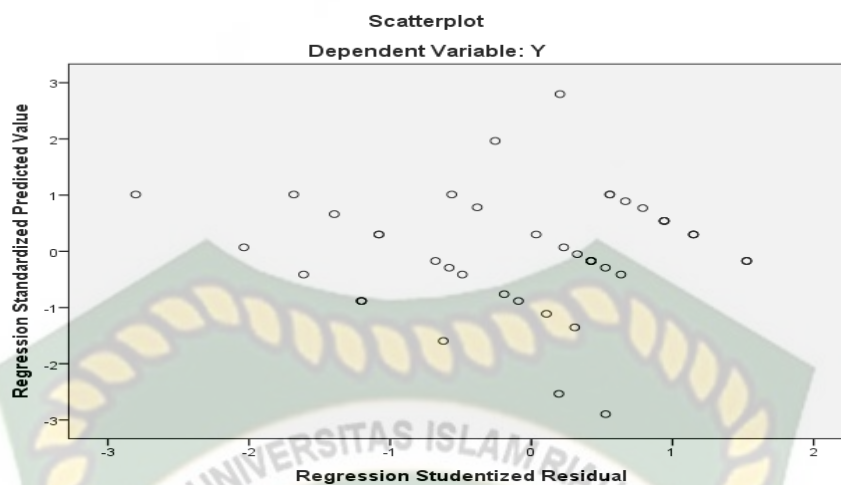
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	X1	.685
	X2	.685
		1.460
		1.460

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 5.5 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya pengaruh multikolinieritas. Nilai VIF variabel independen berdasarkan tabel 5.5 dibawah angka 5 dan mempunyai tolerance mendekati angka 1.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan pada model yang telah bebas asumsi autokorelasi dan multikolinieritas. Pengujian heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatter plot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas. Jika titik-titiknya tidak membentuk suatu pola yang jelas dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas.

**Gambar. V.2**

Dari gambar V.2 dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas.

#### **D. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode enter, dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan adalah model regresi berganda, yaitu dengan menggunakan variabel-variabel pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel V.6:



**Tabel.V.6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.383	1.822		4.052	.000
1 X1	.291	.097	.130	2.934	.016
X2	.534	.106	.706	5.049	.000

a. Dependent Variable: Y

Sesuai dengan hasil analisis regresi pada tabel V.6 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah:  $Y = 7.383 + 0.291X_1 + 0.534X_2$

Maka dengan kata lain persamaan regresi diatas dapat didefinisikan sebagai berikut:

$\beta_0$  = Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 7.383 artinya jika implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern 0 (nol) maka good government governance bernilai 7.383.

$X_1$  = Nilai koefisien regresi variabel implementasi standar akuntansi pemerintah bernilai 0.291, yang dapat diartikan bahwa jika implementasi standar akuntansi pemerintah naik sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan good government governance sebesar 0.291 dengan asumsi implementasi standar akuntansi pemerintah adalah konstan.

$X_2$  = Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern bernilai 0.534, yang dapat diartikan bahwa jika sistem pengendalian intern naik sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan good government governance sebesar 0.534 dengan asumsi sistem pengendalian intern adalah konstan.

## **E. Pengujian Hipotesis**

### **1. Pengujian Secara Parsial (Uji t)**

Pengujian variabel secara parsial (individual) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang pertama dan kedua. Dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan pengujian dua arah serta tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil analisis uji-t maka dapat dilihat pada tabel V.6.

Hasil dari uji t, variabel implementasi standar akuntansi pemerintah diperoleh sebesar 2.934 dengan tingkat signifikan p-value 0.016 ( $p > 0.05$ ) yang artinya lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru.

Hasil dari uji t, variabel sistem pengendalian intern diperoleh sebesar 5.049 dengan tingkat signifikan p-value 0.000 ( $p < 0.05$ ) yang artinya lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru.

### **2. Uji Simultan (Uji F)**

Untuk menguji hipotesis maka dilakukan dua pengujian yaitu uji parsial (t) dan uji simultan (F). Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen. Sedangkan uji simultan (F) dilakukan untuk menguji hipotesis ketiga, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Untuk mengetahui apakah variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh efektivitas penggunaan dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi akuntansi terhadap good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru dapat diketahui dengan melakukan uji F atau dengan uji ANOVA. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$ , dengan tingkat keyakinan 95% atau dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) adalah 5%. Adapun hasil statistic uji F yaitu :

**Tabel V.7**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.901	2	12.950	15.386	.000 <sup>b</sup>
	Residual	37.035	44	.842		
	Total	62.936	46			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil dari uji F diperoleh nilai sebesar 15.386, dengan tingkat signifikan p-value 0.000 ( $p < 0.05$ ) yang artinya lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sehingga diputuskan bahwa  $H_0$  ditolak. Artinya, secara bersama-sama variable sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru. Keputusan ini didukung oleh P-value yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dimana secara statistik nilai ini sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima dan dibuktikan. Hasil ini menunjukkan bahwa

apabila sistem pengendalian intern yang tinggi dan implementasi standar akuntansi pemerintah sistem informasi akuntansi yang selalu diikutsertakan maka kinerja system informasi akuntansi akan tinggi dan baik.

### 3. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel V.8**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.642 <sup>a</sup>	.412	.385	.91745	1.325

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa  $R^2$  pada penelitian ini adalah sebesar 0.385 (38.5%). Dengan demikian variabel implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variabel good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru adalah sebesar 38.5% dan 61.5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

### G. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap good government governance

Dari hasil kuesioner yang disebarakan dapat diketahui tentang implementasi standar akuntansi pemerintah yaitu rata-rata pegawai menyatakan jawabannya dalam kategori baik. Hal ini dilihat dari pengetahuan dan pengalaman pegawai

dalam menggunakan implementasi standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pekerjaan.

Setelah melakukan penyebaran kuisisioner pada pemerintah Kota Pekanbaru, penulis dapat membahas tentang variabel yang telah diteliti. Implementasi standar akuntansi pemerintah adalah hal yang baru dalam pemerintahan. Implementasi standar akuntansi pemerintah yang sudah diolah menghasilkan jawaban responden dalam kategori baik, tetapi di Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual, implementasi standar akuntansi pemerintah ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan good government governance.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam Abdul halim (2007:48), menyatakan : “Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas”.

Dalam pemerintahan penyajian laporan keuangan disajikan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Implementasi standar akuntansi pemerintah meningkatkan good government governance, seperti menurut Ekrem kara, (2011) yaitu ada banyak manfaat menggunakan sistem implementasi standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan telah menjadi lebih jelas, sebanding dan akurat. Sampai saat ini masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Implementasi standar akuntansi pemerintah belum sepenuhnya diterapkan karena terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam hal implementasi standar akuntansi pemerintah, hal itu ditandai dengan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam melakukan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional belum terlalu paham. Hal ini dapat dikarenakan karena saat ini masih digunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual yang belum menggunakan laporan operasional.

Dari penelitian diketahui implementasi standar akuntansi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap good government governance. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang belum cukup memadai baik secara kualitas dan kuantitas dan pegawai pemerintah pengelola asset pada SKPD yang sering berganti-ganti sehingga pengelola asset tersebut tidak mengetahui asset apa yang dimiliki. Pada pemanfaatan aplikasi pendukung dalam mengimplementasikan SAP juga masih menjadi kendala dikarenakan belum terintegrasinya data diantara aplikasi-aplikasi tersebut sehingga harus dilakukan penginputan berulang-ulang.

Dari hasil olah data kuisioner pun didapatkan koefisien regresi untuk variabel bebas X1 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara implementasi standar akuntansi pemerintah (X1) dengan good government governance (Y). Hal ini menunjukkan harus segeranya diterapkan implementasi standar akuntansi pemerintah dipemerintah Kota Pekanbaru guna meningkatkan

good government governance agar dapat mendukung peraturan pemerintah yang sudah ada.

## **2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap good government governance**

Dari hasil kuesioner yang disebarkan dapat diketahui tentang system pengendalian intern yaitu rata-rata pegawai menyatakan jawabannya dalam kategori baik. Hal ini dilihat dari komitmen, pembinaan serta hubungan kerja yang baik antr pegawai dan pimpinan sehingga dapat bersama mengendalikan kinerja dalam pengelolaan system informasi.

Setelah melakukan penyebaran kuisisioner pada pemerintah Kota Pekanbaru, penulis dapat membahas tentang variabel yang telah diteliti. Sistem pengendalian intern adalah hal yang harus selalu dilakukan oleh pemerintah, khususnya dipemerintah Kota Pekanbaru, sisitem pengendalian intern sudah diterapkan dengan baik, hal ini tercermin dalam data kuisisioner yang telah diolah. Sistem pengendalian intern terbagi dalam lima bagian, yang setiap bagiannya harus saling berkesinambungan guna meningkatkan good government governance.

Hal ini sejalan dengan Mahmudi (2007: 27) yang menyatakan bahwa: “Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), good government governance sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

Dari hasil olah datapun dinyatakan bahwa koefisien regresi untuk variabel bebas X2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian intern (X2) dengan good government governance (Y). Walaupun dipemerintah Kota Pekanbaru sistem pengendalian intern sudah baik, tetap harus ditingkatkan lagi bagian-bagian yang memiliki kelemahan, seperti dalam dijelaskan dalam kuisisioner yaitu sistem pencatatan aset yang agak lemah, hal ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. maka daripada itu sistem pengendalian intern harus dijaga kualitasnya agar dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini juga dinyatakan oleh Anindita Primastuti (2006), yaitu untuk memenuhi kriteria keandalan dan relevansi suatu laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian intern yang baik. Dan dengan sistem pengendalian intern yang berkualitas maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bias terhindar dari penyelewengan, resiko salah prosedur, dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal-hal yang menyebabkan sistem pengendalian intern kurang terkendalinya pencatatan dan pengendalian fisik atas aset. Dan kurangnya identifikasi resiko yang dilakukan pimpinan saat ada pengeluaran atau pendapatan yang tidak sesuai dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) sehingga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan pelaksanaan anggaran.



### **3. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap good government governance**

Dari hasil kuesioner yang disebarakan dapat diketahui tentang good government governance OPD yaitu rata-rata pegawai menyatakan jawabannya dalam kategori baik. Hal ini dilihat dari kelengkapan dan kualitas informasi yang dihasilkan dari kinerja pegawai sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara akurat.

Seperti sudah dijelaskan bahwa secara parsial implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap good government governance. Begitu pula secara simultan variabel implementasi standar akuntansi pemerintah (X1) dan sistem pengendalian intern (X2) memberikan pengaruh sebesar 63.3% terhadap good government governance apabila dilaksanakan secara bersamaan.

Dilihat dari besarnya pengaruh sebaiknya kedua variabel tersebut dilakukan dengan baik dan berbarengan demi meningkatkan good government governance yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan meningkatnya good government governance maka pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan opini yang diperoleh oleh pemerintah atas laporan keuangan yang diaudit akan mendapatkan opini yang baik pula.

Dengan laporan keuangan yang berkualitas pula dapat mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik. Seperti Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa: “Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang

diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), good government governance sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

Sistem akuntansi pemerintah daerah yang baru sudah mengatur tentang implementasi standar akuntansi pemerintah ini. Dan juga menurut Purwaniati Nugraheni (2006) laporan keuangan yang disajikan jika sudah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal artinya laporan keuangan telah memuat informasi yang disajikan secara jujur dan wajar. Dan dari hasil kuisisioner yang telah disebar, implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern sama-sama memiliki kelemahan.

Sejak tahun 2010 semestinya implementasi standar akuntansi pemerintah sudah mulai diterapkan tetapi di biro keuangan setda pemerintah Kota Pekanbaru sampai sekarang masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Karena sistem akuntansi kas menuju akrual pun baru diterapkan maka saat terjadi perubahan menjadi sistem implementasi standar akuntansi pemerintah pemerintah provinsi sedikit tertinggal hal itu bisa terjadi karena SDM yang terkait merasa sulit dalam menyesuaikan sistem yang baru lagi. Serta sarana pun masih dirasakan cukup, seharusnya sarana penunjang dalam keadaan yang baik, karena sarana dalam membuat laporan keuangan berbasis akrual seharusnya mendukung seperti dapat menghasilkan laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas. Sistem pengendalian intern pun

masih ada yang kurang terkendali. Itu ditandai dengan kurangnya pengendalian atas pencatatan aset.

Dengan kurangnya pengendalian tersebut dapat menyebabkan kurangnya good government governance. Karena laporan keuangan menjadi kurang relevan, atautidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Pengendalian merupakan kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya. Dengan adanya pengendalian, dapat mengecek kembali tentang semua sitem dan prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yaitu, standar akuntansi pemerintah yang digunakan, prosedur pencatatan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kurang mendukungnya sarana yang ada maka dapat menyebabkan penurunan good government governance. sistem pengendalian intern yang terjadi pun masih kurang optimal sehingga pencatatan atas aset masih kurang terkendali, dengan kurang terkendalnya pencatatan aset tersebut dapat menyebabkan kurang relevannya sebuah laporan keuangan. dengan kurang relevannya sebuah laporan keaungan artinya laporan keuangan kurang berkualitas.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.

1. Hasil dari uji t, variabel implementasi standar akuntansi pemerintah diperoleh sebesar 2.934 dengan tingkat signifikan p-value 0.016 ( $p > 0.05$ ) yang artinya lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru.
2. Hasil dari uji t, variable sistem pengendalian intern diperoleh sebesar 5.049 dengan tingkat signifikan p-value 0.000 ( $p < 0.05$ ) yang artinya lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable good government governance pada Organisasi Perangkat Daerah di Pekanbaru.
3. hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa  $R^2$  pada penelitian ini adalah sebesar 0.385 (38.5%). Dengan demikian variabel implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variabel good government governance pada Organisasi

Perangkat Daerah di Pekanbaru adalah sebesar 38.5% dan 61.5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya implementasi standar akuntansi pemerintah dalam pengembangan sistem informasi akuntansi lebih ditingkatkan, sehingga good government governance dapat ditingkatkan.
2. Hendaknya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki mengembangkan program pelatihan dan pendidikan guna mengajarkan cara menggunakan sistem informasi akuntansi dengan benar.
3. Hendaknya kemampuan spesialis pegawai yang menggunakan system informasi akuntansi lebih ditingkatkan dengan cara memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal maupun program pelatihan yang terkait dengan penggunaan system informasi akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alfin Gustian. 2013. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Implementasi standar akuntansi pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Ekuitas. Bandung.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Devfi, Agustina. 2008. “Pengaruh Budaya Perusahaan dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.” Skripsi UNP.
- Ghazali, Imam, 2012-2013, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan Keempat, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristianto, Yudi. 2011. Pengaruh Aksesibilitas laporan Keuangan dan Implementasi standar akuntansi pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Kesuma, Eka, Putrianti 2014. Pengaruh Audit Internal dan Kepemimpinan yang Efektif dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance. Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Rusmini.2013. Kinerja Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iilir. Skripsi Universitas Mulawarman. Medan.

- Ristanti, Ni Made Asih., Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Tabanan). *eJournal Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 2-14.
- Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Rahmawati., Andika Rusli. 2014. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Kabupaten Luwu. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 04 No. 02.
- Suratmi, Ni Made., Nyoman Trisna Herawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintah, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *Ejournal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 25-28 September.
- Sujana, Edy, 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan), *Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali*. UNDP. 2007. *Governance for Sustainable Development: A Policy Document*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.